

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokratis ekonomi.¹ Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah menyatakan bahwa perbankan syariah telah memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1992. Perkembangan lembaga keuangan syariah masih terus menerus mengalami transformasi ke arah positivisme sistem dan lembaga keuangan di tanah air. Bank syariah diatur secara formal yang diawali dengan diterbitkan Undang-Undang mengenai perbankan syariah melalui UU Nomor 7 tahun 1992 dirubah oleh UU Nomor 10 tahun 1998. Dimana melalui UU No. 10 tahun 1998 ini memberikan landasan operasional bagi bank syariah untuk mengatur dan memperbolehkan setiap bank

¹Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 7

²Yuli Andriansyah, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional", *La-Riba*, Vol.III, No.2, Desember 2009, hlm. 195

konvensional untuk membuka sistem pelayanan syariah (*dual banking system*).

Office channelling kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/PBI/2006 yang menyatakan bahwa bank konvensional dapat membuka layanan syariah dalam operasional usahanya. Kemudian hukum formal pada perbankan syariah semakin lengkap dengan ditetapkannya UU No.21 tahun 2008 yang berisikan peraturan secara menyeluruh untuk setiap BUS, UUS dan BPRS di Indonesia sehingga pertumbuhan lembaga keuangan bank syariah semakin cepat meningkat. Berikut merupakan tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Jaringan Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
BUS					
Jumlah Bank	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.995	2.151	2.121
UUS					
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	336	517	590	320	327
BPRS					
Jumlah Bank	155	156	163	163	161

Sumber: Bank Indonesia (Statistik Perbankan Syariah-Juni 2015)³

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perbankan syariah di Indonesia memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, dengan ini berarti bahwa perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari peran pentingnya bagi perekonomian, terutama perannya dalam mengemban amanah

³Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah-Juni 2015*, http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx, di akses tanggal 22 April 2015

dari pemilik dana dan menyalurkannya untuk usaha produktif khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro. Berdasarkan dua fungsi perbankan syariah sebagai lembaga perantara (*financial intermediaries*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan menjual produk-produk serta akad yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang mengamalkannya. Dengan peran dan fungsinya yang begitu besar itulah yang menyebabkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara (*financial intermediaries*), dimana perbankan syariah menyalurkan dananya kepada usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada laporan perkembangan kredit UMKM triwulan III 2015 yang dikeluarkan bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan total kredit perbankan mencapai 11,5 %, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 10,5%. Berikut pangsa kredit UMKM menurut klasifikasi usaha :

Gambar 1.1
Perkembangan Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM) diolah dari LBU dan LBBPR⁴

Berdasarkan data di atas yang merupakan laporan perkembangan kredit UMKM triwulan III 2015 yang dikeluarkan bank Indonesia menunjukkan bahwa segmen usaha pada akhir triwulan III tahun 2015, pangsa terbesar kredit UMKM merupakan kredit usaha menengah yaitu 48,1 %, selebihnya merupakan kredit usaha kecil sebesar 28,5% dan kredit usaha mikro sebesar 23,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro masih memiliki peluang pendanaan dari lembaga pembiayaan, dan alternatif lembaga pembiayaan. Perbankan syariah yang memiliki peran strategis dalam pendanaan untuk usaha mikro salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Syariah, keberadaan BPRS Syariah dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun

⁴Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Kredit UMKM triwulan III 2015, <http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/laporan/Pages/Laporan-Perkembangan-Kredit-UMKM-Triwulan-III-2015.aspx>, di akses tanggal 22 April 2016

diperkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.⁵ Dan juga BPRS yang memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya. Untuk itu BPRS memiliki misi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, memberdayakan wanita dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, menciptakan lapangan pekerjaan serta mengembangkan usaha nasabah yaitu UMKM.⁶

Pada table 1.2 di bawah ini dapat diketahui pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menunjukkan bahwa BPRS menjalankan perannya sebagai lembaga pendanaan untuk usaha mikro:

Tabel 1.2
Total Pembiayaan BPRS Berdasarkan Golongan Pembiayaan
(Miliyaran Rp)

Golongan Pembiayaan	2011	2012	2013	2014	2015
Usaha Kecil dan Menengah	71.810	90.550	110.046	50.806	51.603
Selain Usaha Kecil dan Menengah	30.845	56.645	74.034	159.5224	152.291
Total	102.655	147.505	184.120	199.330	203.894

Sumber: Bank Indonesia (Statistik Perbankan Syariah-Juni 2015)⁷

Secara umum BPRS memiliki tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya BPRS dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar

⁵Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_112309.aspx, diakses tanggal 20 Maret 2017

⁶A.Buchori, dkk., "Kajian Kinerja Industri BPRSS di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Maret 2003, hlm. 68

⁷Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah-Juni 2015*, http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx, di akses tanggal 22 April 2015

aktiva dapat terjaga (*sustainable*) dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat (*outreach*).⁸ Untuk dapat tetap menjalankan tujuan dan perannya dengan baik, maka BPRS harus selalu meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari pemilik dana dan dapat menyalurkannya untuk membantu produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah.

Zeller dan Meyer memperkenalkan konsep *The Triangle of Microfinance*, yang merupakan indikator kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tiga kategori indikator tersebut yaitu kesinambungan keuangan (*Financial Sustainability*), tingkat jangkauan (*Outreach*) dan dampak keberadaan LKM terhadap lingkungan (*Impact*).⁹ Ketiga indikator tersebut idealnya dapat tercapai oleh LKM, walaupun pada kenyataannya tidaklah mudah untuk mencapai ketiganya secara bersamaan.

Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh BPRS yang merupakan salah satu LKM tersebut. Indikator kesinambungan keuangan (*Financial Sustainability*) dapat diukur dengan melihat perkembangan penggunaan biaya dan nilai keuntungan yang dihasilkan oleh BPRS. Tingkat jangkauan (*Outreach*) dilihat berdasarkan perkembangan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan oleh BPRS, serta seberapa luas wilayah kerja BPRS tersebut. Peran BPRS dalam pengembangan masyarakat dan sebagai

⁸Syafaat Muhari dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen, "Tingkat Efisiensi BPRS di Indonesia Perbandingan Metode SFA dengan DEA dan Hubungannya Dengan CAMEL", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.18, No. 2, Mei 2014, hlm.308

⁹Manfred Zeller dan Richard L.Meyer, *The Triangle Of Microfinance: Financial sustainability, Outreach, and Impact*, (Washington: Johns Hopkins University Press, 2002), hlm.-

sumber pembiayaan UMKM yang berada di wilayah kerjanya merupakan contoh dampak keberadaan BPRS terhadap lingkungan (*Impact*). Menurut Zeller dan Meyer, selalu ada indikator yang lain (*tradeoff*) tetapi dengan pencapaian operasional yang sinergis diantara ketiganya, BPRS dapat dikatakan telah menerapkan konsep dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Juni 2015 menunjukkan bahwa BPRS mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2011 hingga juni 2015.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPRS di Indonesia agar mampu bertahan dalam menghadapi ketatnya persaingan industri keuangan di Indonesia adalah dengan melakukan evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja. Penilaian kinerja adalah alat manajemen untuk menentukan seberapa jauh tujuan perusahaan yang telah dicapai, mengevaluasi kinerja bisnis, manajer, divisi dan individu dalam perusahaan, juga untuk memprediksi harapan perusahaan di masa depan. System pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi.¹⁰ Salah satu Pengukuran kinerja yang dapat dilakukan adalah efisiensi BPRS. Efisiensi merupakan indikator yang penting dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perusahaan atau merupakan salah satu indikator sukses atau tidaknya suatu BPRS, maka dapat diketahui seberapa besar kemampuan BPRS dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang

¹⁰Muhammad Syafii Antonio, dkk, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Jurnal Of Islamic Finance*, Vol.1, No.1 2012, IIUM Institute Of Islamic Banking and Finance, hlm. 13, hlm. 13-14

dimilikinya dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat sebagai nasabah penabung atau nasabah pembiayaan.

Menurut *Global Islamic Finance* menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi pada perbankan syariah. *Pertama*, peningkatan efisiensi pada biaya operasional akan memberikan profit yang lebih besar dan meningkatkan peluang dalam persaingan. Hal ini relevan dengan keberadaan bank syariah yang bersaing dengan bank konvensional di berbagai daerah. *Kedua*, nasabah akan tertarik dengan kualitas dan layanan terbaru yang ditawarkan oleh bank syariah, dan hal ini dipengaruhi oleh efisiensi kinerja bank syariah. *Ketiga*, kesadaran akan pentingnya efisiensi akan membantu para regulator untuk membuat peraturan yang baik pada industri perbankan.¹¹ Maka, BPRS yang merupakan perbankan syariah penting untuk melakukan pengukuran efisiensi kinerja.

Selama ini sering dijadikan acuan pengukuran kinerja untuk melaksanakan evaluasi kinerja perusahaan adalah Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini memiliki keunggulan karena mudah dalam perhitungannya. Namun rasio biaya operasional juga memiliki kelemahan dalam mengukur efisiensi, diantaranya adalah sulit untuk menyamaratakan apakah suatu rasio baik atau buruk dan sulit untuk menyatakan apakah perusahaan tersebut kuat atau lemah dan tidak memperhitungkan biaya modal. Selain itu rasio CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity*), tidak terlalu memperhatikan faktor

¹¹Global Islamic Finance Report, 2011, (diunduh 1 September 2016), tersedia pada http://www.gifr.net/gifr2011/contents/ch_11.PDF, hlm. 104

efisiensi, mengingat bobot dari faktor efisiensi dalam rasio CAMEL yang ditetapkan oleh BI berada pada kisaran 10%-15%.¹²

Untuk mengatasi kekurangan yang ada pada analisis rasio dalam mengukur kinerja perusahaan, maka pendekatan *frontier* dikembangkan untuk menganalisis efisiensi perusahaan. Berger dan Humphrey membagi pengukuran efisiensi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan parametrik dan pendekatan non parametrik. Pendekatan parametrik diantaranya adalah *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA), sedangkan pendekatan non parametrik diantaranya adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Free Disposable Hull* (FDH).

Penelitian tentang efisiensi BPRS di Indonesia masih sangat terbatas. Berbeda halnya dengan studi efisiensi perbankan syariah yang telah banyak menghasilkan laporan penelitian atau paper yang dipublikasikan di jurnal internasional dan nasional. Disamping itu, kebanyakan studi efisiensi hanya fokus pada pengukuran kinerja efisiensi dengan menggunakan pendekatan parametric atau non parametrik (SFA dan DEA) sementara penelitian yang melakukan analisis kinerja lembaga keuangan syariah dengan pendekatan *maqasid syari'ah* (*Sharia Maqasid Index*) masih sangat jarang dilakukan.

Pada sisi teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki beberapa kesamaan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diantaranya dari sisi penerimaan uang, mekanisme transfer, penggunaan teknologi komputer, syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan, laporan keuangan

¹²Syafaat Muhari dan Muhammad Nadratuazzaman Hosen, "Tingkat ..., hlm. 308-309

dan sebagainya. Perbedaan pokok dari BPRS dan BPR salah satunya terletak pada *falah oriented* dan komitmen spiritual dalam berbisnis. *Falah* berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan akhirat.¹³ Dengan demikian perbedaan tujuan BPRS yang lebih luas dibandingkan dengan BPR diperlukannya tolok ukur indikator yang berbeda pula yang mana selama ini seperti yang diungkapkan oleh Mohammed dan Razak bahwa banyak IB *stakeholder* tidak melihat dengan jelas perbedaan perbankan syariah dan konvensional dengan menggunakan tolok ukur konvensional yang sama untuk mengukur perbankan syariah, yang mana tidak terdapat kesesuaian antara indikator-indikator kinerja konvensional dan tujuan yang lebih luas dari perbankan syariah.¹⁴

Sebagai entitas bisnis, BPRS tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah yang dilandaskan kepada konsep *maqasid syari'ah* (*good sharia objectives*).¹⁵ Sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, perbankan syariah memiliki amanah untuk mempertanggungjawabkan atas seluruh kinerjanya yang diinterpretasikan dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya sebagai alat untuk

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 29-34

¹⁴Mustafa Omar Mohammad dan Dzuljastri Abdul Razak, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework", *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Juni 2008, hlm. 2

¹⁵Afrinaldi, "Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari *Maqasid Syariah*: Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah", Jakarta: Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti, 2012, hlm. 2

mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu tahun. Oleh karena itu, perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional baik dalam teori dan praktek, perlu pergeseran paradigma dalam hal pengukuran kinerja mereka yang tidak hanya terbatas pada rasio keuangan.

Menurut M.Syafi'i Antonio, *et.al* bahwa pergeseran paradigma ini berdasarkan pada tiga konsep indikator kinerja yang meliputi indikator ekonomi, lingkungan dan sosial. Ini berarti bahwa ketika sistem perbankan syariah (BPRS) ingin memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan, kegiatan utama mereka harus difokuskan pada pendekatan manfaat tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga untuk para pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan hidup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammed,*et.al*; Kuppusamy,*et.al*; Mohammed dan Taib serta Hameed, *et.al* menunjukkan bahwa pendekatan *Sharia Maqasid Index* dapat dijadikan pendekatan alternatif yang strategis untuk menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan syariah yang lebih universal dan dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dalam mengukur kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dengan analisis efisiensi dan kinerja melalui pendekatan *Data Envelopment Analysis* dan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI). Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang menjawab permasalahan kinerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia serta pendekatan

¹⁶Muhammad Syafii Antonio, dkk, "An Analysis ...", hlm. 13

yang dapat dijadikan alat ukur kinerja BPRS di Indonesia, sehingga kinerja BPRS di Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi ketatnya persaingan industri keuangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pada Juni tahun 2015 memiliki 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di Indonesia. Meningkatnya jumlah industri keuangan syariah menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan antara sesama industri keuangan syariah, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan bertahan BPRS diantara industri keuangan syariah lainnya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perbankan yang dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis*(DEA)?
2. Apa saja target perbaikan yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia untuk mencapai efisiensi optimumnya?
3. Bagaimana tingkat kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis*(DEA).
2. Menganalisis target perbaikan yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia untuk mencapai efisiensi optimumnya.
3. Menganalisis tingkat kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index*.

Terdapat dua manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam serta dapat memperkaya literatur mengenai lembaga keuangan Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan atau kebijakan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, serta mampu memberikan masukan kinerja

bagi BPRS di Indonesia sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan koreksi untuk meningkatkan kinerja BPRS.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang menjelaskan tentang pembahasan penelitian ini. Pembahasan dari hasil penelitian ini tersusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu:

Bab I menguraikan latar belakang masalah yang menjadikan penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan berdasarkan latar belakang masalah, serta menguraikan tujuan dan manfaat penelitian ini. Dengan membaca bab I ini dapat dipahami hal-hal mendasar sebagai pengantar untuk pembahasan bab berikutnya.

Bab II menjelaskan penelitian terdahulu untuk melihat hasil penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau mendekati sama. dalam bab ini diuraikan pula kajian pustaka. Berikutnya menguraikan landasan teori yang dipergunakan dan cara kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menguraikan landasan yang dipergunakan dan cara kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menampilkan kerangka teoritik.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, objek dan sumber data penelitian, variabel dan definisi operasional variabel serta teknis analisis data.

Bab IV menjelaskan hasil analisis data dan pembahasannya

Bab V penutup. Berisi kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini serta saran-saran yang perlu kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang penelitian maupun guna kepentingan penelitian mendatang.

